



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANGGA HERVIANTO**
2. Jabatan : **PEMERIKSA AHLI MUDA/ MUDA**
3. NHK : **402750**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.634.903.869**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 572.393.713
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/66 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 680.777.043
3. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 861.733.113
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **193.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV GENERASI 1 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NAV 1 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **2.750.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **441.170.236**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.271.824.105**

III. HUTANG Rp. **173.763.753**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.098.060.352**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.